

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Diperoleh Gelar Sarjana
Administrasi Publik**



Disusun Oleh:

RONALDUS PANDANGO

NIM. 2017210133

**KOMPETENSI MANAJEMEN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADENI
MALANG**

2021

RINGKASAN

Maraknya pedagang kaki lima di Kota Malang, umumnya disebabkan oleh pengaruh urbanisasi yang tak terkontrol dengan baik. Oleh karena itu dalam penelitian terkait efektivitas penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Malang bertujuan untuk mengkaji terkait bagaimana pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima oleh pemerintah Kota Malang, dengan metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan teknik penentuan informan yakni purposive sampling dan menganalisis dengan menggunakan triangulasi teknik, adapun penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Malang telah melakukan beberapa upaya pemberdayaan penataan PKL di Kota Malang dibuktikan dengan dikeluarkannya perda Kota Malang No.2 Tahun 2012, selanjutnya pemerintah juga rutin menghimbau dan menertibkan pedagang kaki lima yang membandel, dan tidak mengikuti arahan yang diberikan oleh pemerintah Kota Malang. Sedangkan untuk faktor penghambat dari efektivitas pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Malang ialah kurangnya kesadaran dari beberapa PKL sehingga sulit dalam melaksanakan penataan dan Pedagang Kaki Lima beralasan mencari uang pendukung dan Faktor Pendukungnya adalah ada beberapa instansi terkait yang ikut mendukung jalannya penataan Pedagang Kaki Lima seperti halnya Satuan Polisi Pamong Praja dan pedagang kaki lima yang memahami setiap himbauan

Kata Kunci : Efektivitas, Pedagang Kaki Lima, Pemberdayaan, dan Penataan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menonjolnya gejala yang terdapat di Indonesia yang dimaknai sebagai urbanisasi yang nantinya hal yang terbilang positif tidak akan berdatangan akan tetapi hal negatiflah yang berdatangan, tertampungnya urbanit yang berada di sektor formalnya dan urbanit sebagiannya tidak memiliki akan keterampilan yang terbilang tidak dibutuhkannya di kota. Ketidak tertampungnya dalam lapangannya yang ketersediaannya dalam hal formal. Tertampungnya urbanit di bidang formal secara umum dengan statusnya sebagai pencari kerja dan melakukan akan pekerjaan dengan tujuannya melakukan penopangan hidup. Bidang yang muncul dalam hal ini informal sebagai kegiatannya akan pedagang yang mempunyai sifat dalam hal ini kompleks dan bersangkutan dengan jenis dari barang dan juga tata ruangnya dan waktunya. Berbanding kebalikan dengan bidang formal yang penggunaan teknologi yang terbilang maju karena sifatnya akan padat modal dan juga perlindungannya didapatkan dari pemerintah dan bidang yang terbilang informal dengan kelebihanannya disenangi oleh masyarakatnya yang bergolongan bawah. Melalui bidang yang informal inilah biasanya dikenal dengan akan ekonomi bawah tanah. Bidang yang informal dimaknai sebagai unit dari usaha dan tidak sedikit dalam hal menerima akan ekonomi yang diproteksi dengan cara resmi yang asalnya dari pemerintah (Hidayat, 2010:17). Melalui bidangnya informal dalam usahanya dengan skala kecil dan modal dan juga ruang lingkungannya dan melakukan pengembangan yang terbilang terbatas.

Pada daerah yang terbilang perkotaan dan bidang yang informal dengan penganggapan dalam mengundang akan banyaknya masalah yang paling utama adalah yang melakukan operasi pada tempat yang terbilang strategis dan melalui lintasannya adalah lingkungannya menurun yang terdapat di kota, dan pemkot dapat melakukan pengambilan akan pembatasannya melalui kebijakan dalam hal ini ruang gerak yang terbilang informal. Pada kota besar jakarta bidang informalnya mendapatkan akan perlakuan yang terbilang tidak pantas yang asalnya dari penertiban kota dalam hal ini aparat seperti yang diusir dari tempat berusahanya dan juga alatnya serta usahanya akan dilakukan penyitaan.

Melalui permasalahan tersebut bahwa bidang informal memiliki andilnya yang terbilang cukup dan juga berarti dalam melakukan pengurangan akan penganggurannya yang terdapat di kota yang terbilang besar. Melalui penciptaannya akan lapangan kerja nantinya dapat menghasilkan pemasukan dalam hal ini pendapatan yang terbilang cukup dalam melanjutkan hidup di kota yang terbilang besar sehingga tidak menjadi mengganggu yang nantinya malah tidak mendapatkan penghasilannya sendiri. Sesuai dengan surveinya di kota yang terbilang masih berkembang bahwa indonesia juga termasuk sekitar dua puluh sampai tujuh puluh persen dalam berkesempatan bekerja melalui berkegiatan kecil dengan penyebutannya bidang informal, dengan maksud sebagai berkegiatan dalam ekonomi yang tidak masuk dalam organisasi dan juga belum menjangkau akan pemerintah melalui kebijakan (Manning dan Effendi, 1995:87). Bidang informal dalam hal ekonomi mempunyai peran dengan melalui penyediaannya akan barang dan juga jasa untuk sektornya yang terbilang formal, termasuknya bidang informal

seperti PKL melalui daerah perkotaan sebagai sosial dalam hal ini realitas selalu mendapatkan masalah dalam hal ini fisik kota yang nantinya akan ditata dalam akan bermasalah dengan lingkungan (Daldjoeni, 1998:224). Kota Malang terdapat lokasi yang PKL gunakan dan dianggap sebagai pelanggar aturan dalam hal ini tata ruang akan kota yang dimana penetapannya oleh pemerintah dengan cara otomatis sebabkan kekumuhan dan juga mengakibatkan tidak sedapnya pemandangan, seperti berdampaknya trotoar yang salah difungsikan yang seharusnya ditempatkan untuk pejalan kaki nantinya dengan cara melakukan aktivitas berjualan.

PKL dianggap oleh pemerintah sebagai sampah masyarakat yang nantinya diperlukan untuk dibersihkan dan dilakukan penggusuran. Penetapan akan ketertiban dan kebersihan yang dilakukan pemerintah melalui penggusuran. Biasanya di kota besar terjadinya akan penganiayaan dan juga ketidakpantasan untuk dilakukan untuk PKL yang dilakukannya oleh pemerintah dan melalui inilah gaya akan ekonomi Indonesia melakukan peniruan akan sistem ekonomi negara yang terbilang maju sehingga lupa akan esensi dari peniruan dalam melakukan pengaturannya akan ekonomi, bahwa Indonesia yang memfokuskan penampilan dari ekonomi yang terbilang hanya terlihat oleh mata.

Penganggapan pada kualitasnya dan sejahteranya masyarakat dimana pemerintah lupa akan sengsaranya rakyat karena pemerintah dalam memfasilitasi kehidupan yang layak dalam mengatur akan PKL dalam tidak melakukan penggusuran, sehingga keterpurukan bangsa makin terjadi dalam melakukan penggusuran sehingga nantinya juga mengalami peningkatan akan pengangguran. Pemerintah beralasan akan kebersihan dan tertibnya dan dimana pemerintah

perlunya melakukan perapian akan kayu bangunan dan juga hidup yang pantas untuk PKL dengan kewajiban lingkungan yang bersih dijaga. Kejadian inilah sebagai bukti kehadiran dari PKL dan telah menjadi masalah dalam negara dan nantinya akan meningkatkan jumlahnya dari PKL dan tidak adanya pengibangan dalam menata lokasi yang terbilang baik. PKL yang hadir berdampak pada hal negatif dalam hal ini keruwetannya terjadi dan kekumuhan dapat terjadi dan publik yang nyaman menjadi terganggu.

Melalui PKL yang hadir di bagian perkotaan sebagai kenyataan sosial yang berdampak pada masalah tata fisik dari kota dan juga lingkungan untuk dinas koperasi perindustrian dan perdagangan kota malang. Lokasi yang disebabkan berjualannya PKL sebagai penyalahan aturannya tata ruang dari kota yang terbilang menjadi penetapan akan pemerintah yang menyebabkan alif fungsi dari trotoar, melalui masalah tersebut juga terjadi di kota malang bahwa banyak PKL yang berjualan di trotoar dan menyebabkan akan kurangnya berfungsi fasilitas umum kesesuaian peruntukannya dan macetnya lalu lintas serta tata ruang kotanya tidak beraturan dan juga terlihat kumuh di wilayahnya perkotaan.

Sesuai penjelasan tersebut menjadi alasan peneliti dengan pengambilan judul “Efektivitas Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Studi Pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat efektivitas Pelaksanaan Efektivitas Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas Pelaksanaan Efektivitas Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang
2. Untuk mengetahui Apa saja faktor pendukung dan penghambat efektivitas Pelaksanaan Efektivitas Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Malang

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitiannya yaitu:

1. Manfaat akademis

Sesuai hasil akan penelitian dijadikan sebagai bahan yang nantinya akan menjadi kajian, dan penambah pengetahuan bagi yang ingin mengetahui tentang pedagang kaki lima.

2. Manfaat praktis

Nantinya dijadikan landasan dalam dunia kerja dan juga sebagai bentuk penyelesaian masalah akan PKL agar tidak terjadinya penggusuran dan hal lainnya yang tidak mensejahterakan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tanzeh. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras.
- Ali Muhidin Sambas. 2009. *Konsep Efektivitas Pembelajaran*. Pustaka.
- Alimul Hidayat A.A. 2010. *Metode Penelitian Kesehatan Paradigma*. Kuantitatif, Jakarta: Heath Books.
- Ariftiani, Elliza. 2017. *Inti Wasiati Efektivitas Pelaksanaan Penataan Pkl Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Penataan Pkl Kabupaten Jember (Studi Kasus Penataan PKL Jl. Samanhudi Dan Jl. Untung Suropati Kabupaten Jember)*. Jurnal Sosial Politik : Universitas Airlangga. Surabaya. volume 8, no.1.
- Daldjoeni, N. 1998. *Geografi Kota dan Desa*. Bandung : Penerbit Alumni ITB.
- Elliza ariftiani & Inti Wasiati. 2009. *Efektivitas Pelaksanaan Penataan Pkl Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun*. Jakarta: Media Pustaka
- Gibson dan Ivancevich Donnely. 1996. *Organisasi jilid 1 edisi 8*. Jakarta : Binarupa Aksara
- Handyaningrat, Soewarno. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV injur.
- J. Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung:PT Remaja Rosdakarya.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja sektor publik*. yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Manning, Chris dan Tadjuddin Noer Effendi. 1996. *Urbanisasi. Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta : Yayasan Obor.
- Miles, Huberman dan Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. Jakarta. Ui Press
- Moenir. 2006. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja.
- Muttakin, Dikki Ahadiyat. 2019. *Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Efektivitas Penataan Pedagang Kaki Lima (Pkl) Pada Sebagian Ruas Jalan Cihideung Kota Tasikmalaya*. Jurnal Filsafat Politik. Volume 2, No.3
- Paiman, Raharjo. 2009. *Evektifitas penertiban pedagang kaki lima*. Jurnal Ekonomi

- Prasetyawan, M Ardi. 2018. *Pedagang Kaki Lima Mampu Bantu Pertumbuhan Ekonomi Jatim*. kominfojatimprov. diakses pada 9 oktober 2020. <https://kominfo.jatimprov.go.id/umum/pedagang-kaki-lima-mampu-bantu-pertumbuhan-ekonomi-jatim>. Kominfo.
- Raharjo, Paiman. 2020. *Evektifitas penertiban pedagang kaki lima di Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat*. Jurnal Ilmu Sosial: Jakarta
- Ratri, Nurlayla. 2019 *Terkesan Kumuh Jam Jualan PKL di Kota Malang Bakal di Batasi*. MalangTimes.com di akses tanggal 11 September 2021 <https://www.malangtimes.com/baca/38132/20190413/124300/terkesan-kumuh-jam-jualan-pkl-di-kota-malang-bakal-dibatasi>.
- Sejathi. 2011. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pembelajaran*. Jakarta:PT.Buku Seru.
- Sugiyono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono.2015.*Metode Penelitian kombinasi (Mix Methods)*.Bandung: Alfabeta
- Sugiyono.2018.*Metode Penelitian kuantitatif,kualitatif dan R&D*.Bandung: Alfabeta
- Wasistiono. 1998. *Pemberdayaan Aparatur Daerah*. Bandung: Abdi Praja.
- Welianto, Arie. 2020. *Peraturan perundang-undangan, pengertian dan fungsinya*. Kompas.com. Diakses 9 November 2020.<https://kompas.com/skola/peraturan-perundang-undangan-pengertian-zdan-fungsinya>.